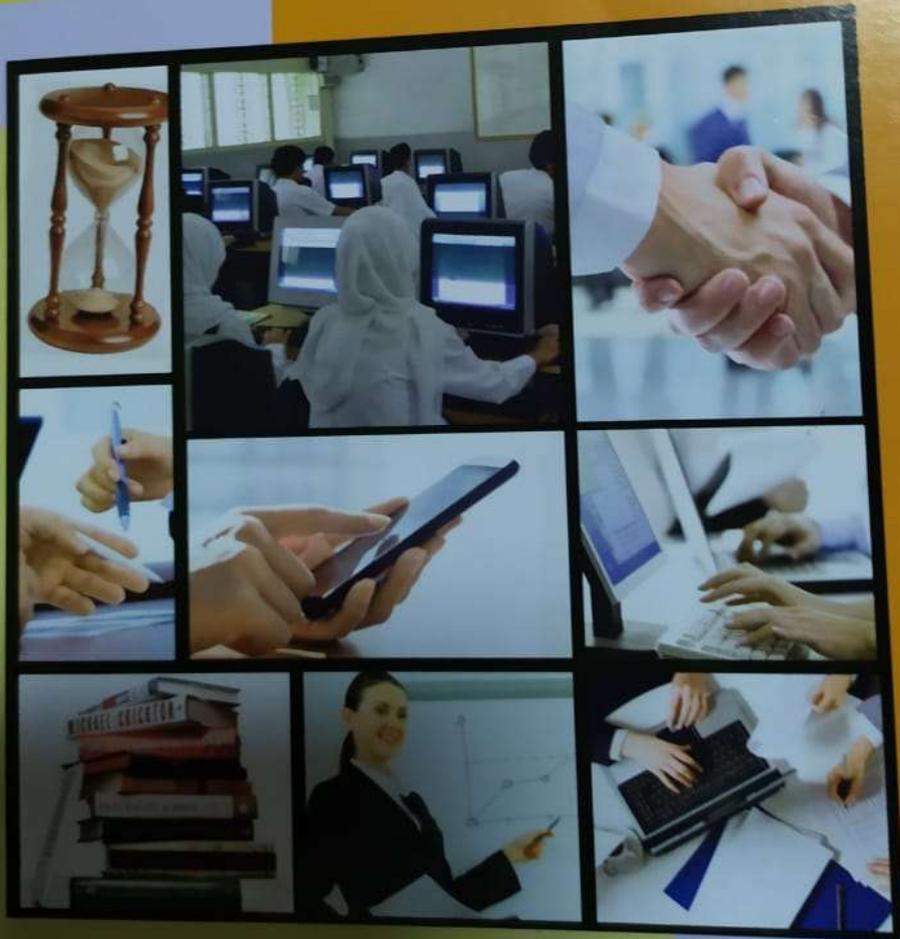


Cepi Safruddin Abdul Jabar, dkk.

# MANAJEMEN PENDIDIKAN



## DAFTAR ISI

Halaman judul - i	
Pengantar - v	
Daftar isi - vi	
<b>Bab 1 : Konsep Dasar Manajemen Pendidikan - 1</b>	
<b>Bab 2 : Organisasi Pendidikan - 23</b>	
<b>Bab 3 : Manajemen Kurikulum - 46</b>	
<b>Bab 4 : Manajemen Peserta Didik - 68</b>	
<b>Bab 5 : Manajemen Personalia Pendidikan - 89</b>	
<b>Bab 6 : Manajemen Fasilitas Pendidikan - 117</b>	
<b>Bab 7 : Manajemen Pembiayaan Pendidikan - 136</b>	
<b>Bab 8 : Manajemen Hubungan Lembaga Pendidikan Dengan Masyarakat - 144</b>	
<b>Bab 9 : Ketatalaksanaan Lembaga Pendidikan - 175</b>	
<b>Bab 10 : Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan - 212</b>	
<b>Daftar Pustaka - 245</b>	

A. Hakik  
Pendid  
yang men  
dan jasn  
pemindah  
lainnya, u  
dibutuhka  
peradaba  
yang men  
Terle  
terkait d  
bersepak  
dipersiap  
didik/pe  
spiritual,  
bisa didi  
ciptaan  
seseoran  
Pendidik

**BAB VIII**  
**MANAJEMEN HUBUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN**  
**DENGAN MASYARAKAT**

**Nurtanio Agus P., M.Pd. & Rahmania Utari, M.Pd.**

**i. Konsep Dasar Hubungan Lembaga Pendidikan dengan Masyarakat**

Keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak, yaitu baik lembaga pendidikan, keluarga, maupun masyarakat. Masing-masing pihak memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas baik dalam bentuk kontribusi berupa dukungan pikiran, ide, dan gagasan serta bantuan materiil yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dengan demikian menjadi kebutuhan lembaga pendidikan untuk mengelola dengan baik hubungannya dengan masyarakat. Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan hubungan masyarakat (humas) yang dilakukan oleh lembaga pendidikan formal (sekolah) atau lembaga pendidikan non formal.

Pada bagian ini dibahas konsep dasar Humas atau *Public Relations* yang dibatasi pada pengertian humas dan asas-asas kegiatan yang diperlukan.

**1. Pengertian Humas**

Istilah hubungan masyarakat atau *public relations* pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, Thomas Jefferson, pada tahun 1807. Pada saat itu yang dimaksud dengan *public relations* adalah *foreign relations* atau hubungan luar negeri. Hingga kini pengertian humas masih menjadi bahan perdebatan para ahli. Oleh karena itu, agar pengertian humas menjadi jelas berikut ini dikemukakan beberapa pendapat ahli.

Glen dan Denny Griswold (1968) menyatakan bahwa "*public relations is the management function which evaluates public attitudes, identified the policies, and procedures of an individual or organization with the public interest, and executes a program of action to earn public understanding and acceptance*". Uraian tersebut berarti humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap publik, menyesuaikan kebijaksanaan dan prosedur instansi atau organisasi dengan kepentingan umum, serta menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat.

Oemi Abdurrahman (1975) menjelaskan humas sebagai upaya memperoleh pengertian, dukungan, kepercayaan, serta penghargaan pada dan dari publik suatu badan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan keterangan dan batasan yang dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan bahwa humas adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama antara lembaga dan masyarakat dengan tujuan memperoleh pengertian, kepercayaan, penghargaan, hubungan harmonis, serta dukungan (*goodwill*) secara sadar dan sukarela.

Kegiatan humas yang dilaksanakan lembaga-lembaga pendidikan atau badan-badan penyelenggara pendidikan dimaksudkan untuk mengabdikan pada kepentingan pendidikan. Kemudian kegiatan itu disebut humas pendidikan. Khusus di sekolah, kegiatan tersebut dapat juga dinamakan publisitas sekolah. Kegiatan humas pendidikan atau lebih konkret hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat memiliki latar belakang pemikiran yang tidak berbeda dengan kegiatan humas pada umumnya. Oleh karena itu, proses kegiatan dan asas penting dalam kehumasan secara umum dapat diterapkan di lembaga pendidikan

## 2. Asas Kegiatan Humas

Agar kegiatan humas dapat dilaksanakan dengan baik, terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan sebagai pedoman. Menurut Ibnu Syamsi (1969) terdapat enam asas kegiatan humas, yakni:

### a. Asas pemberitaan resmi dan obyektif

Pada dasarnya setiap informasi yang diberikan oleh bagian humas adalah informasi resmi dari instansi. Oleh karena itu, informasi humas harus obyektif dan tidak berlebihan.

### b. Asas pemantauan keberesan intern instansi

Sukses tidaknya pelaksanaan kegiatan humas ditentukan oleh baik tidaknya keadaan intern instansi bersangkutan, hubungan baik dengan publik didasarkan pada pelaksanaan kegiatan yang baik pula dari instansi sebagai suatu keseluruhan. Keberesan intern tersebut dapat menyangkut berbagai hal, misalnya disiplin. Disiplin, digambarkan dengan ketepatan waktu para karyawan dalam kedatangan dan kepuialangan dari kantor serta mematuhi peraturan yang berlaku di kantor. Keberesan intern instansi juga tergambar dari moral yang ditegakkan, semisal para karyawan menegakkan sopan santun dan etika. Bawahan hormat kepada atasan, atasan memperlakukan bawahan dengan semestinya, dan karyawan santun melayani para tamu. Selain moral, terdapat juga unsur moril, yakni berkaitan dengan semangat, ketekunan dan giatnya karyawan. Hal lain yang juga mengindikasikan keberesan intern instansi adalah prosedur. Jika prosedurnya berbelit-belit, biasanya akan terjadi sesuatu yang mengecewakan. Hal ini berakibat pada munculnya keengganan untuk berhubungan dengan lembaga, oleh karena itu perlu dibuat prosedur yang ringkas dan sederhana.

### c. Asas pertimbangan dan pengusaha dukungan publik

Sebelum mengadakan kegiatan humas, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai kemungkinan dukungan publik karena kegiatan atau proyek yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum beresiko menghadapi hambatan. Kegiatan yang diharapkan dapat memperoleh dukungan pun, kemungkinan besar harus didahului dengan usaha penyadaran publik tentang manfaat kegiatan humas. Hal itu dilakukan agar publik ikut mendukung dan mensukseskannya. Sebagai contoh, proyek keluarga berencana. Meskipun proyek tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, untuk mendapatkan dukungan publik harus dilakukan usaha penyadaran masyarakat terlebih dahulu.

### d. Asas pelangsungan hubungan

Apabila hubungan dengan publik sudah berjalan, perlu menjaga hubungan tersebut dipertahankan dengan baik. Jangan sampai salah satu di antara publik merasa kecewa sehingga memutuskan hubungan kerjasama. Hubungan yang berkelanjutan juga dapat dimaknai sebagai upaya kerjasama yang dikembangkan terus-menerus, tidak hanya pada satu bidang atau insidental.

### e. Asas pemerhatian opini publik

Opini atau suara publik hendaknya diperhatikan dengan baik. Kritik-kritik, kelakuan-kelakuan, pertanyaan-pertanyaan, pendapat-pendapat, dan saran-saran membangun hendaknya diperhatikan pula. Meskipun pada awalnya hubungan mendapat dukungan penuh, dalam proses selanjutnya mungkin terjadi hal-hal kurang memuaskan, kurang tepat, atau bertentangan dengan kepentingan umum. Mungkin terdapat pula rasa memiliki (*sense of belonging*) dari publik sehingga mereka ingin memberikan saran-saran baik penyempurnaan suatu instansi.

### f. Asas Peningkatan Mutu dan Kegiatan

Petugas humas harus memikirkan dan mengusahakan agar mutu kegiatan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan instansinya. Peningkatan mutu tersebut dapat dilakukan dengan cara

meningkatkan kecakapan atau keahlian para petugas humas. Selain itu, dapat pula meningkatkan teknik penyajian agar tidak membosankan sehingga lebih menarik perhatian publik.

Keenam asas tersebut merupakan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan humas. Bukan berarti keenam asas tersebut merupakan pedoman khusus hanya bagi petugas humas, melainkan pedoman yang harus diperhatikan pula oleh pimpinan instansi.

### 3. Karakteristik Hubungan Lembaga Pendidikan dengan Masyarakat

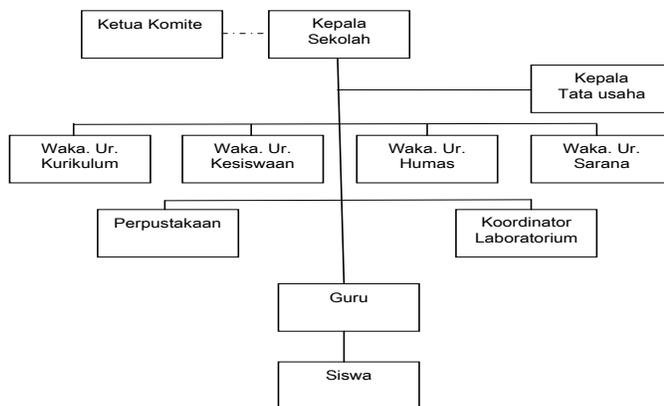
Humas pada lembaga pendidikan memiliki keunikan dibanding dengan humas pada bidang lainnya. Hal ini karena atmosfer edukatif yang melekat pada humas lembaga pendidikan. Berikut ini karakteristik humas lembaga pendidikan ditinjau dari sisi peran, struktur,

#### a. Peran Humas di Lembaga Pendidikan

Hubungan masyarakat merupakan salah satu elemen dasar dalam penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan. Pada aktivitas lembaga pendidikan yang kompleks keberhasilan hubungan dengan masyarakat menentukan pengembangan intitusi secara berkelanjutan. Hubungan masyarakat juga menentukan dukungan atau partisipasi publik (masyarakat) untuk mendukung berbagai kebijakan dan program sekolah.

#### b. Humas dalam struktur organisasi sekolah

Mengingat pentingnya humas di lembaga pendidikan khususnya sekolah, secara khusus bidang tersebut dikelola oleh koordinator khusus terutama pada sekolah-sekolah yang lebih kompleks, misalnya SMP dan SMK/SMK. Kedudukan humas di lembaga pendidikan secara umum sebagai berikut.



Gambar 22.  
Struktur organisasi sekolah

Fungsi humas sejatinya juga diperankan oleh seluruh unsur warga internal lembaga. Citra lembaga ikut diemban oleh pimpinan, staf dan pengajar maupun peserta didik. Namun demikian fungsi humas akan lebih optimal dan terkontrol manakala ada personil tersendiri yang menanganinya. Dalam struktur organisasi sekolah, humas merupakan bagian dari fungsi operasional sekolah yang dikoordinasikan oleh personil /petugas atau unit khusus sesuai dengan besar dan kecilnya organisasi sekolah. Guru pun kerap dimintai bantuan sebagai penanggungjawab bidang humas melalui pemberian tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang humas.

## **B. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan**

### **1. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Sekolah merupakan organisasi terbuka sehingga keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai unsur yang terkait, misalnya keluarga dan masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung menunjukkan tanggung jawab masyarakat dalam memikirkan serta berpartisipasi aktif dalam memajukan pendidikan melalui berbagai cara, misalnya dukungan dana, fasilitas, atau bantuan lainnya. Partisipasi tidak langsung antara lain melalui dukungan non material berupa pengertian dan kesadaran masyarakat untuk kemajuan pendidikan.

Partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai sumbangan tenaga, uang, atau barang dalam rangka menyukseskan program atau proyek pembangunan. Dengan perkataan lain, partisipasi diartikan seberapa besar tenaga, dana, atau barang yang dapat disediakan sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah. Untuk memperoleh pengertian yang tepat mengenai konsep partisipasi masyarakat, terlebih dahulu perlu kita telusuri pengertian partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris *participate* yang berarti ikut mengambil bagian (Woyo Wasito dkk., 1988: 139).

Menurut Soegarda Poerbakawada (1981: 251), partisipasi adalah suatu gejala demokrasi tempat orang-orang diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan segala sesuatu yang berpusat pada berbagai kepentingan. Orang-orang juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajiban mereka. Partisipasi dilakukan dalam bidang fisik maupun bidang material serta dalam bidang penentuan kebijakan.

Davis dalam Mulyono, (1987: 25) mengungkapkan tiga pokok pikiran dalam partisipasi, yaitu:

- a. adanya keterlibatan mental dan pikiran;
- b. adanya kemampuan bertindak atau bekerja;
- c. adanya tanggung jawab terhadap pemmasalahan kelompok dalam mencapai tujuan.

Jika dilihat dari tingkatannya, partisipasi masyarakat menurut (Jumrowi & Subandiyah, 1982: 2) dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan;
- b. Partisipasi dalam proses perencanaan
- c. Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program

Sementara itu, Luthans, seperti dikutip Wuradji (1985: 103), mengatakan bahwa partisipasi dibagi menjadi dua macam, yaitu partisipasi secara penuh dan partisipasi sebagian. Ia juga mengatakan bahwa partisipasi secara penuh hanya mungkin terjadi apabila terdapat satu iklim yang memungkinkan ke arah itu. Meskipun di antara anggota telah terbentuk satu kesadaran untuk menyumbangkan pikiran dan tenaganya, tidak mungkin partisipasi tersebut dapat terwujud tanpa tersedianya peluang untuk melaksanakannya.

### **2. Dasar Pelibatan Masyarakat dalam Pendidikan**

Dasar pelibatan masyarakat dapat ditinjau dari segi yuridis maupun empiris. Secara yuridis, sebagaimana diatur dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab III pasal 4, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Masih dalam aturan yuridis yang sama, khususnya pada bagian ketiga pasal 8 disebutkan juga bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Masyarakat juga berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selain dari aspek yuridis, dasar pelibatan masyarakat dalam pendidikan dapat ditinjau dari dua pangkal, yaitu:

a. Kesamaan Tanggung Jawab

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok dan individu-individu yang berusaha menyelenggarakan pendidikan atau membantu usaha-usaha pendidikan. Dalam masyarakat terdapat berbagai organisasi penyelenggara pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi kepramukaan, organisasi politik, organisasi sosial, organisasi olahraga, atau organisasi kesenian yang bergerak dalam usaha pendidikan. Dalam masyarakat juga terdapat individu-individu atau pribadi-pribadi yang bersimpati terhadap pendidikan di sekolah.

b. Kesamaan Tujuan

Sekolah menghendaki agar para siswanya kelak menjadi manusia pembangun yang Pancasilais. Masyarakat juga menghendaki agar semua warga negara menjadi manusia pembangun yang Pancasilais. Individu yang Pancasilais diharapkan datang dari sekolah. Oleh karena itu, antara sekolah dan masyarakat harus mempunyai kesamaan tujuan.

Secara empiris dan fundamental, keterbatasan instansi pendidikan secara alamiah menyebabkan perlunya pelibatan masyarakat. Dengan adanya bantuan masyarakat maka dapat memperingan tugas lembaga dalam meningkatkan mutu pendidikan. Lembaga juga memerlukan adanya dukungan moral dan masukan serta harapan masyarakat sekaligus kontrol atas kinerja dan produktivitasnya.

### 3. Tujuan dan Manfaat Pelibatan Masyarakat

Pelibatan masyarakat bertujuan untuk melengkapi kekurangan dan membantu lembaga pendidikan. Paling tidak ada dua hal yang menjadi tujuan pelibatan masyarakat yaitu

a. Saling Saling Membantu Saling Mengisi

Waktu belajar siswa di sekolah sangat terbatas, yaitu tujuh jam. Di luar sekolah mereka berada di rumah atau di lingkungan. Waktu senggang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan atau organisasi, misalnya kegiatan kepramukaan, keolahragaan, kesenian, dan keagamaan. Selain itu, masyarakat dapat pula menyelenggarakan pendidikan yang bersifat spesialisasi, misalnya pendidikan keahlian.

b. Membantu Keuangan, Bangunan, dan Barang

Pendidikan yang baik membutuhkan ruang belajar, alat bantu, dan dana yang cukup. Dana yang terdapat di sekolah biasanya terbatas sehingga memerlukan sumber dana yang berasal dari sumber lain, antara lain yang berasal dari masyarakat dengan berbagai bentuk.

Pelibatan masyarakat juga akan memberi manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi lembaga sendiri maupun masyarakat yang dilibatkan. Pariata Westra (1977: 18) menguraikannya sebagai berikut:

- 1) Memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar.
- 2) Memungkinkan para staf menggunakan kemampuan berpikir secara kreatif.
- 3) Mengembalikan nilai-nilai martabat manusia (*humanity*), dorongan (*motivasi*), serta membangun kepentingan bersama.
- 4) Mendorong orang untuk lebih bertanggung jawab.
- 5) Memperbaiki semangat kerja sama serta menimbulkan kesatuan kerja (*team work*).
- 6) Memungkinkan untuk mengikuti perubahan-perubahan atau mencapai kemajuan.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan akan berdampak juga pada masyarakat itu sendiri dalam bentuk nilai balik yang bisa bersifat wawasan bahkan ekonomis.

#### **4. Prasyarat Partisipasi Masyarakat**

Menurut Pariata Westra(1977: 16), agar partisipasi dapat tercapai dengan baik, masyarakat harus memperhatikan beberapa prasyarat partisipasi, antara lain:

- a. Tersedianya waktu yang cukup untuk mengadakan partisipasi karena partisipasi sulit dilaksanakan dalam keadaan serba darurat;
- b. Pembiayaan partisipasi hendaknya tidak melebihi hasil-hasil yang akan diperoleh serta memperhatikan segi-segi penghematan;
- c. Pelaksana partisipasi harus memandang pentingnya keberadaan kelompok. kerja yang akan diparticipasikan;
- d. Peserta partisipasi harus mempunyai kemampuan khusus sehingga efektif untuk diparticipasikan;
- e. Pelaku partisipasi harus dapat berhubungan secara timbal balik sehingga dapat saling bertukar ide dengan pengertian dan bahasa yang sama;
- f. Tidak ada pihak-pihak yang merasa bahwa posisinya terancam akibat adanya partisipasi.
- g. Partisipasi akan lebih efektif jika didasarkan asas kebebasan bekerja.

Untuk mengarahkan masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam pembangunan, Simanjuntak (1991: 112) mengemukakan hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut.

- a. Memilah partisipasi berdasarkan jenis sumbangan
- b. Mewadahi partisipasi.
- c. Menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkungan
- d. Membangkitkan adanya prakarsa.

#### **5. Bidang Kerja Sama Sekolah dengan Masyarakat**

Bidang kerjasama sekolah dengan masyarakat mencakup banyak aspek, antara lain dalam hal:

- a. Pendidikan Moral
- b. Pendidikan Olahraga
- c. Pendidikan Kesenian
- d. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
- e. Pendidikan Keterampilan

Peran serta masyarakat bukan hanya pada pelaksanaan program kerja lembaga. Lebih jauh dari itu, masyarakat dapat terlibat baik dalam proses perencanaan atau pembuatan keputusan, pelaksanaan sampai pemanfaatan dan pengevaluasian program.

#### **6. Bentuk dan Sifat Partisipasi Masyarakat**

UU no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pada bagian ke satu pasal 54 menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Ayat kedua pasal tersebut menyebutkan masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Wujud partisipasi masyarakat sebagaimana disampaikan Dusseldorp dalam Subandiyah (1989: 12) antara lain sebagai berikut:

- a. Mendatangi pertemuan;
- b. Melibatkan diri dalam diskusi;

- c. Melibatkan diri dan berpartisipasi dalam segala aspek organisasi, misalnya menyelenggarakan pertemuan kelompok, mempengaruhi orang luar untuk ikut dalam kegiatan kelompok, serta memimpin diskusi kelompok;
- d. Membantu untuk memperoleh bantuan tenaga, modal, fasilitas, dan kemampuan mental;
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;
- f. Berperan dalam pemanfaatan hasil.

### C. Klasifikasi Publik Pendidikan

Lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang senantiasa mengalami kendala yang berasal dari dalam maupun luar. Dalam kenyataannya suatu hal yang dianggap kendala, sebenarnya merupakan peluang bagi organisasi.

Peran dan tugas hubungan masyarakat adalah menciptakan, membina, dan mengembangkan hubungan baik dengan publik atau *stakeholders* pendidikan. Kasali (2005:63) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *stakeholders* adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar organisasi yang memiliki peran dalam menentukan keberhasilan lembaga. Lebih lanjut Kasali (2005:64) menjelaskan *stakeholders* pendidikan menjadi dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Apabila pendapat tersebut diadaptasi dalam bidang pendidikan, maka *stakeholders* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Stakeholders Internal	Stakeholders Eksternal
Siswa	Siswa
Manajemen	Orangtua
Karyawan	Pemerintah
Keluarga Karyawan	Pesaing/lingkungan

Tabel 2. Pengelompokan stakeholders pendidikan

Khusus siswa, keberadaannya dapat menjadi *stakeholders* internal maupun eksternal. Dari sudut pandang siswa sebagai customer, ia ditempatkan sebagai *stakeholders* eksternal, sedangkan dari perspektif keterlibatannya dalam proses pendidikan ia merupakan *stakeholders* internal

Tinjauan lain tentang klasifikasi publik sebagaimana dikemukakan oleh Soemirat dan Ardianto dkk (2004) adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Keterangan
Publik internal dan publik eksternal	Publik internal: publik yang berada di dalam lembaga, publik eksternal: Publik yang berada di luar lembaga
Publik primer, sekunder, dan marjinal	Urutan publik didasarkan pada prioritas lembaga yang perlu diperhatikan lembaga.
Publik tradisional dan publik masa depan	Pegawai dan pelanggan adalah publik tradisional, sedangkan seperti konsumen potensial, pemerintah adalah publik masa depan
Proponents, opponents dan uncommitted	Opponent: kelompok yang menentang lembaga, proponents: yang memihak, dan uncommitted: tidak peduli.

Silent majority dan vocal minority	Ditinjau dari aktivitas publik dalam mengkomplain/mendukung lembaga. Contoh: penulis di koran: vocal minority sedangkan mayoritas pembaca: <i>silent majority</i> .
------------------------------------	---

Tabel 3. Klasifikasi publik

Keberhasilan manajemen dalam memberikan kepuasan bagi *Stakeholders* seringkali menjadi indikator keberhasilan lembaga pendidikan. Dengan adanya kepuasan baik *stakeholders* internal dan eksternal berpotensi besar meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari publik terhadap lembaga pendidikan.

## D. Bentuk dan Proses Kegiatan Humas Pendidikan

### 1. Jenis dan Teknik Kegiatan Humas Lembaga Pendidikan

Klasifikasi jenis kegiatan humas dapat didasarkan pada sasaran yang dituju. Tinjauan ini membedakan jenis kegiatan humas ke dalam 2 bagian, yaitu humas keluar (humas eksternal) dan kegiatan humas ke dalam (humas internal). Di bawah ini uraian lebih lanjut perihal jenis kegiatan humas tersebut.

#### a. Kegiatan Eksternal

Kegiatan ini selalu dihubungkan dan ditunjukkan kepada publik atau masyarakat di luar sekolah. Terdapat dua kegiatan yang dapat dilakukan, yakni kegiatan tidak langsung dan kegiatan langsung atau tatap muka. Kegiatan tidak langsung adalah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat melalui perantara media tertentu, misalnya melalui televisi, radio, media cetak, pameran, dan penerbitan majalah. Kegiatan langsung atau tatap muka adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung, misalnya rapat dengan pengurus Komite Sekolah, konsultasi dengan tokoh masyarakat, dan melayani kunjungan tamu.

#### b. Kegiatan Humas Internal

Sasaran humas internal adalah warga sekolah, yakni para guru, tenaga administrasi (tata usaha), dan para siswa. Pada prinsipnya kegiatan internal bertujuan untuk:

- 1) memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan dan
- 2) perkembangan sekolah;
- 3) menampung saran dan pendapat warga sekolah yang berhubungan
- 4) dengan pembinaan dan pengembangan sekolah;
- 5) memelihara hubungan harmonis sehingga tercipta kerjasama antar warga sekolah

Kegiatan internal dapat dibedakan atas kegiatan langsung, yaitu tatap muka, dan kegiatan tidak langsung, yaitu melalui media tertentu. Kegiatan langsung, antara lain berupa rapat dewan guru, upacara sekolah, karya wisata atau rekreasi bersama, dan penjelasan lisan di berbagai atau event sekolah lainnya. Untuk kegiatan tidak langsung, antara lain berupa penyampaian informasi melalui surat edaran, penggunaan papan pengumuman sekolah, penyelenggaraan majalah dinding, penerbitan buletin untuk dibagikan kepada warga sekolah, pemasangan iklan atau pemberitahuan khusus melalui media massa dan pelaksanaan kegiatan tatap muka yang tidak bersifat rutin, antara lain pentas seni dan acara tutup tahun.

Teknik kegiatan humas di lembaga pendidikan khususnya sekolah antara lain dapat ditempuh dengan:

1. Melalui Komite Sekolah, di dalamnya terdapat unsur masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha dan industri.

2. Melalui Konsultasi, Sekolah dapat mengadakan konsultasi dengan seorang ahli yang ada di masyarakat, misalnya tentang siswa yang mengalami hambatan. Konsultasi dapat dilakukan dengan dokter, psikolog maupun pihak lain yang berkompeten.
3. Melalui Surat-menyurat, kegiatan ini dapat dilakukan sekolah dengan pihak lain yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan solusi yang tepat.
4. Melalui Rapat Bersama, sekolah dapat menguncang organisasi atau perseorangan yang bersimpati terhadap pendidikan untuk rapat bersama dalam membahas suatu masalah.
5. Melalui Bazar Sekolah.
6. Melalui Penyusunan Program Bersama.
7. Melalui kegiatan ilmiah, misalnya ceramah oleh ahli.
8. Melalui media radio, televisi, maupun media internet.

## **2. Proses Humas**

Aktivitas humas berpusat pada bagaimana memahami perasaan dan sikap publik, dengan demikian indikator keberhasilan proses humas adalah kemampuannya dalam mengubah sikap atau yang dipersepsikan publik. Oleh karena itu, proses humas selalu dimulai dan diakhir dengan penelitian terhadap sikap atau persepsi publik (Kasali, 2005: 82).

Proses humas menurut Kasali (2005: 82-85) meliputi 1) identifikasi permasalahan, 2) perencanaan dan penyusunan program, 3) aksi dan komunikasi dan 4) evaluasi. Berikut ini penjelasan atas masing-masing tahapan tersebut:

- a. Identifikasi permasalahan